



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl Soekarno- Hatta Komplek Pertanian Sukomananti

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : DINHUT

Diterima Tgl: 29/5/13

No. Surat : 500-3/1132/PH/1-2013

No. Agenda : 1068

Tgl Surat : 3-5-13

Sifat :

Perihal : tindak lanjut hasil mo pitorong.

Disposisi

- Sekretaris
- Kabid Perencanaan
- Kabid Bina Hutan
- Kabid Pemanfaatan
- Kabid Perlindungan
-

Utk di ketahui .

20/5/13

Kasi pemungutan Htt

Utk
rif 31/5/13 .



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jalan Raden Saleh No. 8 A Padang Telp (0751) 7052725- 7054414 Fax (0751) 7059511

E mail : kehutanan @sumbarprov.go.id

Nomor : 502.3 / 1132 / PH - 2013 Padang, 3 Mei 2013

Lampiran :

Perihal : Tindakanjuz Hasil Monitoring Kepada Yth.

Kepala Dinas yang Membidangi Kehutanan
di Kabupaten/Kota Se- Sumatera Barat
Di-

TEMPAT

Sehubungan dengan Hasil Pelaksanaan Pengawasan dan Monitoring Produksi dan Iuran Kehutanan Ke Kabupaten/Kota yang telah dilaksanakan pada 10 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat oleh 10 Tim antara tanggal 20 Maret 2013 s/d 04 April 2013, bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1. Produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu di Kabupaten/Kota yang dimonitor sebagaimana tabel 1 berikut.

Tabel 1. Produksi Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat

No.	Kabupaten/kota	Produksi Kayu (M ³)	Produksi Non Kayu		Ket
			Rotan/Manau	Getah Pinus	
1	2	3	4	5	
1.	Dharmasraya	20.680,396	0	0	
2.	Agam	557,14	0	0	
3.	Sijunjung	0	0	0	
4.	Solok Selatan	33872,13	*)22.876,17 M ³	36,20 M ³ Kayu Indah	*) KBK
5.	Tanah Datar	0	0	171.049	
6.	Lima Puluh Kota	8,69	0	15.200	
7.	Pasaman Barat	943,35	0	0	
8.	Pesisir Selatan	486		22.000	
9.	Solok	85,86	0	89.974	
10.	Kep. Mentawai	20.085,65	10.000	5.000 kg rotan	
JUMLAH		76.718,37			

2. Hasil penelitian Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH dan DR yang telah diterbitkan oleh Pejabat Penagih untuk semua Kabupaten/Kota secara umum telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Jumlah SPP, jumlah tagihan, jumlah bukti setor dan jumlah setoran PSDH dan DR pada masing-masing Kabupaten/Kota yang dimonitor sebagaimana tabel 2 berikut.

Tabel 2. Jumlah SPP, jumlah tagihan, jumlah bukti setor dan jumlah setoran PSDH dan DR pada masing-masing Kabupaten/Kota yang dimonitor

No.	Kabupaten/kota	PSDH		DR		Ket
		Jlh SPP/BS	Jumlah Tagihan	Jlh SPP/BS	Jumlah Tagihan	
			(Rp)		USD	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dharmasraya	17	200.109.470	17	87.430,30	

1	2	3	4	5	6	7
2.	Agam	36	22.123.920	36	6.801,52	
3.	Sijunjung	0	0	0	0	
4.	Solok Selatan	6	516.574.578	6	183.091,50	
5.	Tanah Datar	3	2.446.000	0	0	
6.	Lima Puluh Kota	3	530.200	1	104,28	
7.	Pasaman Barat	3	49.706.280	3	12.632	
8.	Pesisir Selatan	13	13.142.774	13	8.454,06	
9.	Solok		3.661.310		775,72	
10.	Kep. Mentawai	8	1.201.977.982,50	7	280.893,08	
JUMLAH		89	2.010.272.515	83	580.182,46	

4. Terdapat Surat Perintah Pembayaran yang belum ada bukti setornya di Kabupaten Solok, yaitu SPP Nomor 07.03.2013 dan Nomor 04.03.2013 yang diterbitkan tanggal 26 Maret 2013 An. Usman Juaro Kayo sebanyak 22,50 M3 dengan jumlah tagihan PSDH sebesar Rp. 810.000 dan DR USD 270,00. Disarankan agar segera ditagih sebagaimana mestinya oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Solok dan menyampaikan hasilnya kepada kami pada kesempatan pertama.
5. Penyampaian Laporan Pembayaran Iuran Kehutanan (LPIK) dari wajib bayar pada umumnya sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2007, sedangkan penyampaian laporan bulanan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota belum tertib dan tepat waktu.
6. Diharapkan kiranya agar Saudara menyampaikan laporan bulanan Pembayaran Iuran Kehutanan (LPIK) secara tertib dan tepat waktu sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2007 bahwa Kepala Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan Laporan Realisasi Penyetoran Iuran Kehutanan (LRPIK) setiap bulan dari seluruh Wajib Bayar di wilayah kerjanya kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha kehutanan (BUK), dan Kepala UPT Ditjen BUK selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Demikian hasil kegiatan ini kami sampaikan untuk ditindaklanjuti, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



KEPALA DINAS,
Mewakili,

Ir. RUSWIN RUSTAM

NIP. 19620404 198903 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati / Walikota se-Sumatera Barat di **Tempat**.
2. Kepala BPPHP Wilayah III di **Pekanbaru**.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian Sukomananti

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari: Dinhut Provinsi

Diterima tanggal: 17/11-15

No. Surat : 522-3/2015/PH-2015

No. Agenda : 14 DB

Tgl Surat : 17-11-15

Sifat :

Perihal masukan besaran Harga Patokan Hasil Hutanbaru.

Disposisi

- Sekretaris
- Kabid Perencanaan
- Kabid Bina Hutan
- Kabid Pemanfaatan
- Kabid Perlindungan
-

Utah diutamakan

kasl pemnyutan

- untuk diberi masukan ke dishut prop.

- buat surat segera

15/11/15
u

Jfr 20/11-2015



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jln. Raden Saleh No. 8 A Telp. (0751) 7052725, Fax. (0751) 7059511

Nomor : 522.3 / 2705 / PH - 2015
Lampiran : -
Perihal : Masukan Besaran Harga Patokan Yth Hasil hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu.

Padang, 17 November 2015

Kepada Yth;
Kepala Dinas yang membidangi
Kehutanan Kabupaten/Kota
.....
di

Tempat

Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 516/PHPL-IPHH/2015 tanggal 31 Oktober 2015 perihal Masukan Besaran Harga Patokan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu, bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jenis dan tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan pajak yang berlaku pada Kementerian kehutanan, ditetapkan bahwa harga patokan ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan d.h. Menteri kehutanan berdasarkan harga jual rata-rata :
 - a. Hasil hutan kayu dari hutan alam di Tempat Pengumpulan;
 - b. Hasil hutan kayu dari hutan tanaman berdasarkan Nilai rata-rata tegakan di hutan ;
 - c. Hasil hutan bukan kayu di Tempat Pengumpulan.
2. Berkaitan dengan hal tersebut, diminta agar Saudara dapat segera menyampaikan masukan besaran harga patokan hasil hutan kayu dan non-kayu di wilayah kerja Saudara untuk dijadikan bahan pertimbangan penetapan harga patokan periode berikutnya dan apabila ada penambahan komoditi yang belum tercantum pada Permenhut Nomor P.68/Menhut-II/2014, kami sarankan untuk mencantumkan dalam usulan besaran harga patokan tersebut.
3. Agar masukan harga patokan dimaksud dapat kami terima pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ir. HENDRI OCTAVIA, M.Si
NIP. 19581029 198703 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari di Jakarta



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian Sukomananti

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari: BPPHP

Diterima tanggal: 17/3-15

No. Surat: 45-36/BPPHP-III-21/15

No. Agenda: 322

Tgl Surat: 27-1-15

Sifat:

Perihal: Pemberlakuan Permenhut No P.91/menthut-11/2015

- Sekretaris
- Kabid Perencanaan
- Kabid Hutan
- Kabid Pemanfaatan
- Kabid Perlindungan
-

Disposisi

Wth dr - Jeddourani
12/3-20/15

sdr yandri

- Arsipkan

[Signature]
17/3-2015



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN
BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH III
Jl. Arifin Ahmad Telp./Fax. (0761) 61115 Kotak Pos 1006
PEKANBARU

27 Januari 2015

Nomor : S. 36 /BPPHP III-2/2015
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberlakuan Permenhut No. P.91/Menhut-II/2014

Yth . 1. Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana terlampir;
2. Pemegang IUPHHBK dan IPHHBK sebagaimana terlampir.

Tempat

Sehubungan dengan telah diundangkannya Permenhut Nomor : P.91/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal Dari Hutan Negara dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P. 15/VI-BIKPHH/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal Dari Hutan Negara, dengan ini kami sampaikan Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Petugas Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal Dari Hutan Negara sebagaimana terlampir.

Lebih lengkap Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.91/Menhut-II/2014 dan lampirannya dapat di **download** di www.dephut.go.id

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai,

Ir. Rudi Eko Marwanto
NIP. 19621111198901 1 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan (sebagai laporan);
2. Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan;
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau;
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
5. Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau.

Lampiran Surat Kepala BPPHP Wilayah III Pekanbaru

Nomor : S. 36 /BPPHP III-2/2015

Tanggal : 27 Januari 2015

DAFTAR DINAS KABUPATEN/KOTA YANG MEMBIDANGI KEHUTANAN

A. Provinsi Riau :

1. Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar;
2. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak;
3. Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis;
4. Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu;
5. Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hilir;
6. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan;
7. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu;
8. Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir;
9. Dinas Kehutanan Kabupaten Kuantan Singingi;
10. Dinas Pertanian Kota Pekanbaru;
11. Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kota Dumai;
12. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti.

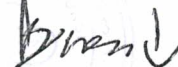
B. Provinsi Sumatera Barat :

1. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Agam;
2. Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman;
3. Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Solok;
5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Padang Pariaman;
6. Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar;
8. Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung;
9. Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
10. Dinas Pertanian Kota Bukit Tinggi;
11. Dinas Pertanian Kota Padang Panjang;
12. Dinas Pertanian Kota Sawahlunto;
13. Dinas Pertanian Kota Solok;
14. Dinas Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan Kota Padang;
15. Dinas Pertanian Kota Payakumbuh;
16. Dinas Pertanian Kabupaten Pariaman;
17. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Dharmasraya;
18. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Solok Selatan;
19. Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

C. Provinsi Kepulauan Riau :

1. Dinas Pertanian Kota Tanjung Pinang;
2. Dinas Pertanian Kabupaten Karimun;
3. Dinas Pertanian Kabupaten Natuna;
4. Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam;
5. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lingga;
6. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kepala Balai,



Ir. Rudi Eko Marwanto
NIP. 19621111198901 1 001

Lampiran Surat Kepala BPPHP Wilayah III Pekanbaru

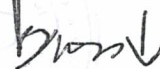
Nomor : S. 36 /BPPHP III-2/2015

Tanggal : 27 Januari 2015

DAFTAR PEMEGANG IUPHHBK DAN IPHHBK LINGKUP KERJA BPPHP WILAYAH III PEKANBARU

1. BMT Putra Bungsu
2. CV. Alam Lestari
3. CV. Berkah Alam
4. CV. Bintang Mandiri
5. CV. Ilham
6. CV. Karya Mandiri
7. CV. Khirana Furnance
8. CV. Lingga Wilantara
9. CV. Maju Bersama
10. CV. Merkusii Lestari
11. CV. Mitra Jaya
12. CV. Mitra Usaha Mandiri
13. CV. Muda Karya
14. CV. Mutiara Hitam
15. CV. Poland Jaya
16. CV. Ridho Pratama
17. CV. Seilou Sogo Oil
18. CV. Tusam Hijau Lestari
19. IPHHBK An. Binsar Tonny Hutapea
20. IPHHBK An. Delmon
21. IPHHBK An. Enny Efrida
22. IPHHBK An. Novriliko Alfi
23. IPHHBK An. Suarman
24. IPHHBK An. Tonny Sinaga
25. Kelompok Tani Anggrek Putih
26. Kelompok Tani Cemara
27. Kelompok Tani Karya Bersama
28. Kelompok Tani Pitopang
29. Kelompok Tani Sungai Tuo
30. Koperasi Nagari Tanjung Barulak
31. Koperasi Serikat Anak Nagari
32. KUD Atar Sakato
33. Primer Koperasi Kepolisian RI
34. Primkoppol Resort Payakumbuh
35. PT. Inhutani IV
36. PT. Perhutani Anugerah Kimia
37. PT. Pinus Tulen
38. UD. Mandiri Jaya
39. UD. Sinar Rotan

Kepala Balai,



Ir. Rudi Eko Marwanto
NIP. 19621111198901 1 001

Lampiran Surat Kepala BPPHP Wilayah III Pekanbaru
Nomor : S. 36 /BPPHP III-2/2015
Tanggal : 27 Januari 2015

**TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PETUGAS PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
YANG BERASAL DARI HUTAN NEGARA**

A. Pengangkatan WAS-GANISPHPL sebagai P2LP-HHBK :

1. Persyaratan Umum untuk dapat diangkat sebagai P2LP-HHBK adalah sebagai berikut :
 - a. Pegawai pada Dinas Kabupaten/Kota;
 - b. Memiliki Kartu WAS-GANISPHPL sesuai kompetensinya yang masih berlaku.
2. Dalam hal pada Dinas Kabupaten Kota tidak tersedia WAS-GANISPHPL sesuai kompetensi yang dibutuhkan, maka dapat ditugaskan WAS-GANISPHPL dengan kompetensi yang lain.
3. P2LP-HHBK diangkat oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan keputusan pengangkatan yang didasarkan pada izin dari pejabat yang berwenang.
4. Keputusan pengangkatan sekurang-kurangnya memuat nama, NIP, pangkat, jabatan, nomor register, wilayah kerja penugasan, specimen tandatangan serta masa tugas P2LP-HHBK.
5. Masa tugas menyesuaikan dengan masa berlaku kartu WAS-GANISPHPL atau masa berlaku izin sedangkan nomor register menggunakan nomor register kartu WAS-GANISPHPL.
6. Salinan keputusan agar disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi, Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru dan pemegang izin.

B. Pengangkatan GANISPHPL sebagai Pembuat LP-HHBK / Penerbit FA-HHBK

1. Persyaratan Umum untuk dapat diangkat sebagai pembuat LP-HHBK adalah sebagai berikut :
 - a. Karyawan pada pemegang izin yang sah;
 - b. Memiliki Kartu GANISPHPL sesuai kompetensinya yang masih berlaku.
2. Dalam hal pemegang izin tidak memiliki GANISPHPL sesuai kompetensi yang dibutuhkan, maka dapat ditugaskan GANISPHPL dengan kompetensi yang lain.
3. Dalam hal pemegang izin tidak memiliki GANISPHPL, maka dapat menggunakan GANISPHPL pada pemegang izin lainnya atau WAS-GANISPHPL pada Dinas Kabupaten/Kota.
4. Dalam hal WAS-GANISPHPL telah ditugaskan sebagai Pembuat LP-HHBK, maka tidak dapat ditugaskan lagi sebagai P2LP-HHBK pada pemegang izin yang sama.
5. Pembuat LP-HHBK / Penerbit FA-HHBK diangkat oleh pemegang izin dengan keputusan dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten Kota dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru.
6. Keputusan pengangkatan sekurang-kurangnya memuat nama, jabatan, nomor register, specimen tandatangan serta masa tugas.
7. Masa tugas menyesuaikan dengan masa berlaku kartu GANISPHPL atau masa berlaku izin sedangkan nomor register menggunakan nomor register kartu GANISPHPL.

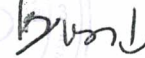
C. Pemberhentian WAS-GANISPHL sebagai P2LP-HHBK:

1. P2LP-HHBK diberhentikan apabila :
 - a. Berhenti sebagai pegawai kehutanan karena pensiun, mengundurkan diri atau diberhentikan dan berhenti sebagai pegawai,
 - b. Pindah tugas ke tempat lain atau instansi lain,
 - c. Terbukti melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas sebagai P2LP-HHBK,
 - d. Dikenakan sanksi pembekuan/pencabutan kartu WAS-GANISPHL.
2. Pemberhentian P2LP-HHBK ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan keputusan dan salinannya disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru.

D. Pemberhentian GANISPHPL sebagai Pembuat LP-HHBK / Penerbit FA-HHBK :

1. Pembuat LP-HHBK / Penerbit FA-HHBK diberhentikan apabila :
 - a. Berhenti sebagai karyawan pemegang izin karena mengundurkan diri, meninggal dunia atau diberhentikan,
 - b. Terbukti melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas sebagai Pembuat LP-HHBK / Penerbit FA-HHBK,
 - c. Dikenakan sanksi pembekuan/pencabutan kartu GANISPHPL.
2. Pemberhentian Pembuat LP-HHBK / Penerbit FA-HHBK ditetapkan oleh pemegang izin dengan keputusan dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru, dengan melampirkan bukti/alasan pemberhentian.

Kepala Balai,



Ir. Rudi Eko Marwanto
NIP. 19621111198901 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raden Saleh no. 8A Padang Telp. (0751) 7052725 – 7054414 Fax. (0751) 7059511

E mail : Kehutanan@sumbarprov.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 094.3/758/PH-2015

Dasar : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Industri (2.02.2.02.01.21.03.5.2.2.15.0001).

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama : JUMIANTA,S.Sos
Jabatan : Staf Dinas Kehutanan Provinsi. Sumatera Barat
2. Nama : MARDIRIZAL
Jabatan : Staf Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Untuk : 1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka Monitoring/Pembinaan dan Pengendalian IUIPHK CV Wana Lestari dan CV Famili Jaya di Kabupaten Pasaman Barat.
2. Perjalanan dinas ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari mulai tanggal 20 April s/d 21 April 2015.
3. Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Industri Kehutanan 2.02.2.02.01.21.03.5.2.2.15.0001
4. Melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas ini secara tertulis kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Dikeluarkan di : Padang

Pada Tanggal : 17 April 2015

KEPALA DINAS
DINAS KEHUTANAN
Mewakili
Ir. RUSWIN RUSTAM
NIP. 19620404 198903 1 004

Tembusan : Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat.
2. Pimpinan CV. Wana Lestari di Tempat.
3. Pimpinan CV Famili Jaya di Tempat



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian Sukomananti

LEMBAR DISPOSISI	
Surat Asal: dihut PROV	Diterima tanggal: 12/5-15
No. Surat : 522-1 / 535 / PH - 15	No. Agenda : 595
Tgl Surat : 6-5-15	Sifat :
Perihal : bimbingan teknis-	
<input type="checkbox"/> Sekretaris	Disposisi
<input type="checkbox"/> Kabid Perencanaan	
<input type="checkbox"/> Kabid Bina Hutan	
<input checked="" type="checkbox"/> Kabid Pemanfaatan	Segera TL ? y/ diilahi
<input type="checkbox"/> Kabid Perlindungan	12/5-15
<input type="checkbox"/>	kasi poredaran - untuk diberitahu kepada IUPHHK yang ada di daerah pasbar - segera
	<i>[Signature]</i> 13/5-2015



Kotak Pos 100

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raden Saleh No. 8A Padang Telp. (0751) 7052725 – 7054414 Fax. (0751) 7059511

E_mail : Kehutanan@sumbarprov.go.id

Nomor : 522.1/935/PH-2015
Lampiran :
Perihal : Bimbingan Teknis Percepatan SL-K bagi
UIIPHHK kapasitas s.d. 6.000 M3/Th,
TPT, IKM (IUI dan TDI) dan Hutan Hak

Padang, 6 Mei 2015

Kepada Yth.
Kepala Dinas Yang Membidangi
Kehutanan di Kabupaten/Kota
di -

Tempat

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor S.198/VI-BPPHH/2015 tanggal 29 April 2015 perihal sebagaimana pokok surat di atas, bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka percepatan pelaksanaan SVLK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan memfasilitasi kegiatan sertifikasi dan penilaian pertama secara berkelompok bagi UIIPHHK kapasitas sampai dengan 6.000 M3/Tahun, TPT, IKM (IUI dan TDI) dan hutan hak dengan biaya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Guna memperlancar kegiatan dimaksud, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan melakukan pertemuan dengan UIIPHHK kapasitas sampai dengan 6.000 M3/Tahun, TPT, IKM (IUI dan TDI) dan hutan hak pada hari **Kamis tanggal 28 Mei 2015 yang bertempat di Aula Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Jalan Raden Saleh Nomor 8 A Padang** (susunan acara terlampir). Untuk berkoordinasi dapat menghubungi Sdr. Syamsul Bahri, S.Hut.MSi Hp. 08126723725.
3. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, diminta Saudara agar dapat menginformasikan kepada UIIPHHK kapasitas sampai dengan 6.000 M3/Tahun, TPT, IKM (IUI dan TDI) dan hutan hak yang ada di wilayah kerja Saudara untuk dapat hadir dalam acara dimaksud (transport peserta dan penginapan tidak ditanggung).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,

Ir. HENDRI OCTAVIA, M.Si

NIP. 19581029 198703 1 003

Tembusan Kepada Yth.

1. Bapak Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan di Jakarta
2. Direktur Bina Produksi dan Peredaran Hasil Hutan di Jakarta
3. Direktur Multistakeholder Forestry Programme 3 di Jakarta

ANALISIS SWARA

ANALISIS SWARA

Susunan Acara
Bimbingan Teknis Percepatan Sertifikasi Legalitas Kayu
Bagi IUIPHHK kapasitas sampai dengan 6.000 M3/Tahun, TPT, IKM dan Hutan Hak
Di Padang tanggal 28 Mei 2015

Waktu	Kegiatan	Keterangan
07.30 – 08.30 WIB	Registrasi Peserta	Panitia
08.30 – 09.00 WIB	Pembukaan	
	1. Arahan dan Pembukaan	Kepala Dinas Provinsi Sumatera Barat
	2. Pembacaan Doa	Panitia
09.00 – 09.45 WIB	Kebijakan SVLK dan Percepatan Sertifikasi Kelompok	Direktorat BPPHH
09.45 – 10.45 WIB	Diskusi	Moderator
10.45 – 11.00 WIB	Coffee Break	Panitia
11.00 – 12.45 WIB	Penjelasan dan Praktek Pemenuhan Verifer (<i>Gap Assessment</i>)	Direktorat BPPHH dan MFP 3
12.45 – 13.00 WIB	Penutupan	Panitia
13.00 – selesai	ISHOMA	Panitia



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian Sukomananti

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari: Dinhut Prov.

Diterima tanggal: 11/6-15

No. Surat : 654/3/1202/PPH-15

No. Agenda : 700

Tgl Surat : 10-6-15

Sifat :

Perihal SPT-

Disposisi

- Sekretaris
- Kabid Perencanaan
- Kabid Bina Hutan
- Kabid Pemanfaatan
- Kabid Perlindungan
-

Periliksi

11/6-15

*Didampingi of Sandra Meri Chandr
v. d. dgn. lebaik 3 r/c.*

11/6 2015



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raden Saleh No. 8 A Padang Telp (0751) 7052725 – 7054414 Fax (0751) 7059511

Kotak Pos 100

E-Mail : kehutanan@sumbarprov.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 094.3 / 1282 / PPH - 2015

- DASAR** :
1. Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dalam Undang- undang Nomor 19 Tahun 2004.
 2. DIPA BA 029 (01) Satuan Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.

MEMERINTAHKAN :

- KEPADA** :
1. Nama : NOVI HENDRI, S.Hut, M.Si
Jabatan : Kepala Seksi Konservasi dan Jasa Lingkungan
 2. Nama : KASNAN
Jabatan : Staf Dinas Kehutanan Prop. Sumbar
 3. Nama : CUCU SUKARNA, S.IP
Jabatan : Staf Dinas Kehutanan Prop. Sumbar
 4. Nama : SUMARDI
Jabatan : Staf Dinas Kehutanan Prop. Sumbar
 5. Nama : PM
Jabatan : Staf Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
 6. Nama : PM
Jabatan : Staf Balai KSDA Sumatera Barat

- UNTUK** :
1. Melaksanakan Identifikasi Calon Lokasi Ekosistem Esensial di Kabupaten Pasaman Barat..
 2. Surat Perintah Tugas ini berlaku selama 4 (empat) hari terhitung tanggal 12 s/d 15 Juni 2015.
 3. Biaya yang timbul akibat dilaksanakan kegiatan ini dibebankan pada DIPA BA 029 (01) Satuan Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2015.
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

DIKELUARKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 10 JUNI 2015

KEPALA DINAS,

Ir. HENDRI OCTAVIA, M.Si
NIP. 19581029 198703 1003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di SIMPANG EMPAT.
2. Kepala Balai KSDA Sumatera Barat di PADANG.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian Sukomananti

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari: Dinhut Pro.

Diterima tanggal: 11/6-15

No. Surat : 522-6 / 1201 / PPH - 15

No. Agenda : 702

Tgl Surat : 10 - 6 - 15

Sifat :

Perihal Bantuan Tenaga

Disposisi

Sekretaris

Kabid Perencanaan

Kabid Bina Hutun

Kabid Pemanfaatan

Kabid Perlindungan

.....

*Tugaski 1 staf yg sudah
dan menguji lahan*

11/6 15

Kada Meri.

*1. Urutkan SPT & M dampingi
kelapangan sd selesai*

P 11/6 2015



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raden Saleh No. 8 A Padang Telp (0751) 7052725 – 7054414 Fax (0751) 7059511

Kotak Pos 100

E-Mail : kehutanan@sumbarprov.go.id

Nomor : 502.6 / 1081 / PPH - 2015
Lampiran :
Perihal : Bantuan Tenaga

Padang, 10 Juni 2015

Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
2. Kepala Balai KSDA Sumatera Barat

di -

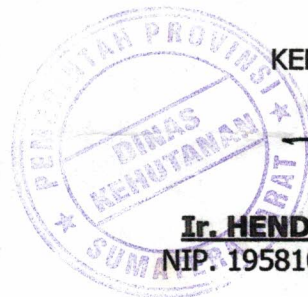
TEMPAT

Sehubungan DIPA BA 029 (01) Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2015 (sumber dana APBN) khususnya tentang Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial, bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut :

1. Bahwa melalui kegiatan tersebut telah dialokasikan anggaran untuk melaksanakan Kegiatan identifikasi calon lokasi ekosistem esensial yang dalam pelaksanaannya melibatkan Dinas Kehutanan Kabupaten/ Kota dan Balai KSDA Sumatera Barat.
2. Kegiatan identifikasi ini dimaksudkan untuk menginventarisasi calon lokasi ekosistem penyangga kehidupan berupa ekosistem atau wilayah yang memiliki keunikan dan atau fungsi penting dari habitat dan atau jenis didasarkan pada aspek nilai tata ruang, keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, nilai ekologi, sosial, ekonomi, budaya, dan jasa lingkungan.
3. Berkenaan dengan hal tersebut untuk tahap awal kami akan melaksanakan identifikasi calon lokasi ekosistem esensial di Kabupaten Pasaman Barat yang dijadwalkan pada tanggal 12 s/d 15 Juni 2015.
4. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menugaskan 1 orang staf dari dinas/ instansi masing-masing sebagai tenaga pendamping kegiatan tersebut.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,



Ir. HENDRI OCTAVIA, MSI
NIP. 195810291987031003



Kotak Pos 100

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jl. Raden Saleh No. 8 A Padang Telp (0751) 7052725 – 7054414 Fax (0751) 7059511

E-Mail : kehutanan@sumbarprov.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 094.3/2249 / PPH - 2015

- DASAR :
1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan;
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
 4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA 29 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (080053) Tahun Anggaran 2015.

MEMERINTAHKAN :

- KEPADA :
1. Nama : MUKHLIS, S.Sos, S.Hut, M.Si
Jabatan : Kasi Pengendalian Kebakaran Hutan Dishut Prov.Sumatera Barat.
 2. Nama : SYAIFUL
Jabatan : Polhut Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
 3. Nama : SUMARDI
Jabatan : Staf Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
 4. Nama : PM
Jabatan : Personil Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat.

- UNTUK :
1. Melakukan perjalanan dinas dalam rangka Sosialisasi Bahaya Kebakaran Hutan di Kabupaten Pasaman Barat.
 2. Surat Tugas ini berlaku selama 3 (tiga) hari dari tanggal 29 September 2015 sampai dengan 1 Oktober 2015.
 3. Biaya yang ditimbulkan oleh pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA 29.01 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (080053) Tahun Anggaran 2015.
 4. Melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas ini secara tertulis kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

DIKELUARKAN DI : Padang
PADA TANGGAL : 29 September 2015



Tembusan disampaikan kepada Yth :

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di **Simpang Ampek.**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raden Saleh No. 8 A Padang Telp (0751) 7052725-7054414 Fax (0751) 7059511

Kotak Pos 100

E-mail : kehutanan@sumbarprov.go.id

Nomor : 592.6 / 2033 / PPH - 2015

Padang 3 September 2015

Lampiran

Perihal : Sosialisasi Bahaya Kebakaran
 Hutan dan lahan di Kabupaten/ kota.

Kepada Yth.

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota
 di

Tempat

Sehubungan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA. 29 (01) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015, bersama ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Dalam rangka menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan dalam beberapa bentuk kegiatan diantaranya penguatan kelembagaan melalui Sosialisasi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten/ Kota.
2. Sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BA. 29 (01) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 terdapat sub kegiatannya antara lain Sosialisasi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten/kota.
3. Selanjutnya Tim Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat akan turun ke lapangan dalam rangka memberikan Sosialisasi Bahaya Kebakaran hutan kepada masyarakat.
4. Berkaitan dengan itu dalam rangka memudahkan pelaksanaan diharapkan bantuan dari Saudara untuk memfasilitasi segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan nantinya antara lain ; tempat pertemuan di Nagari, dengan jumlah peserta 40 orang berasal dari masyarakat yang berdekatan dengan kawasan hutan.
5. Untuk konsumsi pertemuan dan penggantian biaya transportasi bagi peserta telah tersedia pada DIPA BA. 29 (01) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth :

Gubernur Sumatera Barat di Padang.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raden Saleh No. 8 A Padang Telp (0751) 7052725-7054414 Fax (0751) 7059511

Kotak Pos 100

E-mail : kehutanan@sumbarprov.go.id

Nomer : 522.6 / 2033 / 0011 - 2015

Lampiran

Padang 3 September 2015

Perihal : Sosialisasi Bahaya Kebakaran
 Hutan dan lahan di Kabupaten/ kota.

Kepada Yth.

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota
 di

Tempat

Sehubungan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA. 29 (01) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015, bersama ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Dalam rangka menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan dalam beberapa bentuk kegiatan diantaranya penguatan kelembagaan melalui Sosialisasi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten/ Kota.
2. Sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BA. 29 (01) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 terdapat sub kegiatannya antara lain Sosialisasi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten/kota.
3. Selanjutnya Tim Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat akan turun ke lapangan dalam rangka memberikan Sosialisasi Bahaya Kebakaran hutan kepada masyarakat.
4. Berkaitan dengan itu dalam rangka memudahkan pelaksanaan diharapkan bantuan dari Saudara untuk memfasilitasi segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan nantinya antara lain ; tempat pertemuan di Nagari, dengan jumlah peserta 40 orang berasal dari masyarakat yang berdekatan dengan kawasan hutan.
5. Untuk konsumsi pertemuan dan penggantian biaya transportasi bagi peserta telah tersedia pada DIPA BA. 29 (01) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth :

Gubernur Sumatera Barat di Padang.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian Sukomananti

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari: Dinhut Prov

Diterima tanggal: 26/6-15

No. Surat : 582-6/1131/PPH-15

No. Agenda : 679

Tgl Surat : 20-5-15

Sifat :

Perihal undangan

Disposisi

- Sekretaris
- Kabid Perencanaan
- Kabid Bina Hutan
- Kabid Pemanfaatan
- Kabid Perlindungan
-

Utah di hadapan
3/6-2015 a

Kasi Sampas :

1. Siapkan SPT Kabid + Kasi Sampas
2. Menghantir

3/5 2015



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raden Saleh No. 8 A Padang Telp (0751) 7052725 – 7054414 Fax (0751) 7059511

Kotak Pos 100

E-Mail : kehutanan@sumbarprov.go.id

Nomor : 522.6 / 1131 / PPH - 2015
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Undangan

Padang, 28 Mei 2015

Kepada Yth :

Daftar Terlampir

Di Tempat

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya kegiatan Fasilitas Pengendalian Kebakaran Hutan dalam bentuk Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan tahun 2015 yang dibiayai dari Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (05) sumber dana APBN Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu Pejabat untuk hadir pada :

Hari/ Tanggal : Rabu, tanggal 10 Juni 2015.

Waktu : 08.00 wib s/d selesai.

Tempat : Aula Kantor Dinas Kehutanan Prov. Sumbar
Jalan Raden Saleh No. 8 A Padang.

Acara : Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan Tahun 2015
(Jadwal Terlampir).

Perlu diberitahukan bahwa panitia pelaksana hanya menyediakan konsumsi dan bantuan Transportasi, sedangkan biaya perjalanan dinas kami harapkan berasal dari anggaran Instansi terkait sesuai daftar terlampir.

Konfirmasi nama Peserta, NIP, Pangkat, serta Jabatan diterima paling lambat hari Selasa tanggal 9 Juni 2015 melalui surat, faximile ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan nomor telepon (0751) 7052725-7054414, Fax (0751) 7059511 atau Contact person Sdr. MUKHLIS, S.Sos, S.Hut M.Si HP. 081363404076 selaku Kepala Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,

Ir. HENDRI OCTAVIA, M.Si
Pembina Utama Madya /
NIP. 19581029 198703 1 003

Tembusan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di **Padang**.
2. Bupati/Walikota se Sumatera Barat di **Tempat**.

Lampiran Surat

Nomor : 502.6 / 1131 / PPH - 2015

Perihal : Undangan

Daftar Undangan

NO	INSTANSI	JUMLAH PESERTA
1	2	3
1	Dinas Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan Kota Padang	2 orang
2	Dinas Kehutanan Kab. Dharmasraya	2 orang
3	Dinas Kehutanan Kab. Sijunjung	2 orang
4	Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kab. Lima Puluh Kota	2 orang
5	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Solok	2 orang
6	Dinas Kehutanan Kab. Kep. Mentawai	2 orang
7	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Solok Selatan	2 orang
8	Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Pesisir Selatan	2 orang
9	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Agam	2 orang
10	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Tanah Datar	2 orang
11	Dinas Kehutanan Kab. Pasaman	2 orang
12	Dinas Pertanian Kota Sawahlunto	2 orang
13	Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat	2 orang
14	Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kab. Pd. Pariaman	2 orang
14	BBTNKS Wil. III Sumatera Barat	2 orang
15	Dinas Pertanian Kota Payakumbuh	1 orang
16	Dinas Pertanian Kota Pariaman	1 orang
17	BKSDA Sumatera Barat	2 orang
18	KPHL Model Bukit Barisan Prov. Sumatera Barat	1 orang
19	KPHP Model Kab. Pesisir Selatan	1 orang
20	KPHP Model Kab. Lima Puluh Kota.	1 orang
21	KPHP Model Kab. Dharmasraya	1 orang
22	KPHL Model Kab. Solok	1 orang

23	PT. Pagai Lumber	1 orang
24	PT. Multi Karya Lisun Prima	1 orang
25	PT. Bukit Raya Mudisa	1 orang
26	PT. Salaki Summa Sejahtera	2 orang
27	PT. Inkut Agritama	1 orang
28	PT. Sukses Jaya Wood	1 orang
29	PT. Dhara Silva Lestari	1 orang
30	PT. Andalas Wahana Berjaya	1 orang
31	PT. Incasi Raya	2 orang
	Jumlah	50 orang

KEPALA DINAS



Ir. HENDRI OCTAVIA, M.Si
Pembina Utama Madya /
NIP. 19581029 198703 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian Sukomananti

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : Dinhut Prov

Diterima tanggal: 10/6-15

No. Surat : 100 / 1214 / PPH - 15

No. Agenda : 695

Tgl Surat : 3 - 6 - 15

Sifat :

Perihal : landangan workshop penyusunan rencana Peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan

Disposisi

- Sekretaris
- Kabid Perencanaan
- Kabid Bina Hutan
- Kabid Pemanfaatan
- Kabid Perlindungan
-

1. Anti progresnya

10/6/15



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian Sukomananti

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari: Dimhut Pro

Diterima tanggal: 25/2-15

No. Surat : 527-6/35/PHH-15

No. Agenda : 267

Tgl Surat : 23-2-15

Sifat :

Perihal Permintaan bantuan Personil

Disposisi

- Sekretaris
- Kabid Perencanaan
- Kabid Bina Hutani
- Kabid Pemanfaatan
- Kabid Perlindungan ✓
-

25/2 - 2015



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raden Saleh No. 8 A Padang Telp (0751) 7052725 – 7054414 Fax (0751) 7059511

Kotak Pos 100

E-Mail : kehutanan@sumbarprov.go.id

Nomor : 522.6 / 335 / PPH - 2015 Padang, 23 Februari 2015
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Bantaun Personil Kepada Yth.
dalam rangka Cross Check Hot Spot Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat.
dan Patroli Kebakaran Hutan. di -
TEMPAT

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya kegiatan Cross Check Hot Spot/ Titik Api dan Patroli Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pasaman Barat yang dibiayai dari dana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Cross Check Hot Spot/ Titik Api dan Patroli Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan akan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari tanggal 25 Februari sampai dengan 27 Februari 2015.
2. Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan 2 (dua) orang personil dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat untuk mendampingi Tim dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka kegiatan tersebut di atas.
3. Konfirmasi bantuan personil diterima paling lambat hari Senin tanggal 24 Februari 2015 melalui surat, faximile ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan nomor telepon (0751) 7052725-7054414, Fax (0751) 7059511 atau kontrak person Sdr. MUKHLIS, S.Sos, S.Hut M.Si HP. 081363404076 selaku Kepala Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,

Ir. HENDRI OCTAVIA, M.Si
NIP. 19581029 198703 1 003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raden Saleh no. 8A Padang Telp. (0751) 7052725 – 7054414 Fax. (0751) 7059511
E_mail : Kehutanan@sumbarprov.go.id


Nomor : 522.1 / 7061 / PM - 2015
Lampiran : 1 (satu) buku
Perihal : Mohon Arahan Pelayanan Dalam Rangka
Pemberian Pertimbangan Teknis IPK pada
Areal Penggunaan Lain (APL)

Padang, 16 Desember 2015

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari
Cq. Direktur Usaha Hutan Produksi
di-
Jakarta

Sehubungan dengan dengan Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor 522/1447/DIN.HUT/2015 tanggal 26 Nopember 2015 perihal Permintaan Pertimbangan Teknis Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT Pangkalan Agritama, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PT Pangkalan Agritama telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Kelompok Tani Simpang Lolo sebagaimana Akta Nomor 3.094/I/LEG/2015 tanggal 31 Oktober 2015, untuk melaksanakan pembangunan perkebunan dan kehutanan pada areal Kelompok Tani Simpang Lolo dan mengajukan permohonan IPK atas areal Kelompok Tani Simpang Lolo tersebut di atas, kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
 2. Mempedomani Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2014 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, disebutkan bahwa IPK pada areal APL yang telah dibebani izin peruntukan diberikan oleh Bupati yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota, dengan pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan Provinsi.
 3. Berdasarkan surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/Sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perizinan dalam bentuk pemberian atau pencabutan izin dilaksanakan oleh susunan/tingkatan pemerintahan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.
 4. Selanjutnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat Edaran Nomor SE.5/MenLHK-II/2015 tanggal 21 Mei 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan yang terkait dengan perizinan dan non perizinan yang selama ini menjadi kewenangan Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Pemerintahan No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam pelaksanaan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.
 5. Berkenaan dengan hal-hal tersebut, guna menghindari kesalahan prosedur yang akan dapat berdampak hukum di masa datang, kami mohon arahan dan petunjuk Bapak terkait dengan pemberian pertimbangan teknis IPK sebagaimana dimaksud di atas.
- Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,

HENDRI OCTAVIA, MSI
NIP. 19581029 198703 1 003

Kepada Yth.

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
- ✓ 2. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat.
3. Direktur PT Pangkalan Agritama di Tempat